

ABSTRAK

Program nuklir Iran pada masa pemerintahan Ahmadinejad merupakan lanjutan kebijakan dari pemerintahan Iran sebelumnya. Bahkan dimulai jauh sejak Syah Iran berkuasa sebelum akhirnya terguling dalam Revolusi Islam Iran. Program sempat terhenti ketika Perang Irak-Iran berkecamuk akibat penyerangan Irak terhadap instalasi nuklir di Bushehr. Setelah itu pemerintah Iran mengalami kesulitan mencari *partner* dalam membangun proyek tersebut. Pada akhirnya Rusia bersedia membantu Iran mengaktifkan kembali program itu, namun yang terjadi kemudian adalah penundaan atau *suspension* pada pemerintahan Khatami. Di tengah perdebatan tentang jangkauan penundaan dan kecurigaan adanya pelanggaran atas perjanjian non-proliferasi nuklir, pemerintahan Ahmadinejad memutuskan untuk melanjutkan program nuklirnya.

Kemudian timbul permasalahan adalah mengapa pemerintahan Ahmadinejad tetap mempertahankan program pengembangan nuklir Iran. Permasalahan ini diteliti dengan sebuah desain penelitian yang memadukan kerangka analisis kebijakan luar negeri, konsep kepentingan nasional, *image* dan tekanan, serta alternatif kebijakan, sehingga dihasilkan hipotesis yang pada prinsipnya memuat hubungan kausal antara kebijakan pemerintahan Ahmadinejad mempertahankan program nuklir Iran dengan program nuklir sebagai alternatif kebijakan untuk penghematan dan adanya tekanan.

Melalui desain penelitian yang sebenarnya masih parsial bila dibandingkan dengan kompleksitas persoalan yang diteliti, didapat beberapa temuan. Pertama, alasan pembenaran pemerintahan Ahmadinejad dalam mempertahankan program nuklirnya karena program nuklir tersebut merupakan alternatif kebijakan yang ditujukan untuk penghematan energi dengan kepentingan ekonomi di dalamnya. Kedua, adanya kecenderungan tekanan terhadap program nuklir Iran membuat pemerintahan Ahmadinejad tetap mempertahankan program nuklirnya. Hal ini sesuai dengan kebijakan luar negeri Iran yang menolak segala bentuk intervensi atau dominasi asing.

Kata Kunci: program nuklir, tekanan, alternatif, penghematan, kebijakan luar negeri Iran.